

**PENDIDIKAN ARKEOLOGI, MERENTANG JALAN
HARMONISASI**
Renungan untuk Maluku

Wuri Handoko

*Adalah di Maluku kita menemukan tradisi saling membantu
untuk mendirikan sarana ibadah baik sesama umat Islam
dan yang terpenting dengan Non Muslim
(Ambary, 1998:159)*

Sepenggal kalimat di atas saya pilih untuk mengawali tulisan dalam makalah ini. Kalimat yang ditulis Hasan Muarif Ambary ini sebuah kesimpulan atas berbagai hasil penelitian arkeologi, di wilayah kepulauan Maluku, termasuk penelitiannya di Ternate. Kesimpulan itu, menegaskan bahwa kerukunan dan keharmonisan masyarakat Maluku sejatinya telah terbina sejak dulu.

Makalah ini berupaya menegaskan, arkeologi bisa menjadi media untuk pemuliharaan harmonisasi masyarakat Maluku paska konflik. Sebagai ilmu, arkeologi memang seharusnya bisa memberikan energi untuk itu.

Maluku Kini : Merangkai Harmonisasi di Bekas Reruntuhan Konflik

Kurun waktu tahun 1999-2003 masyarakat kepulauan Maluku tercabik dalam Konflik panjang. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan, banyak memakan korban baik nyawa maupun harta.

Kini masyarakat Maluku mulai menata kembali kehidupan sosialnya, merangkai harmonisasi, di bekas reruntuhan konflik. Tak dapat disangkal, kondisi belum sepenuhnya pulih, dan kemungkinan energi konflik masih ada. Variabel konflik seperti yang diuraikan Vermonte (2004) meliputi: ekonomi, aliran politik dan ideologi, kultur dan agama serta diskriminasi (lihat, Vermonte dan Budiman (ed), 2004:3-5).

Khusus Maluku, beberapa variabel tersebut mungkin juga berpengaruh terhadap munculnya potensi konflik.

A. Variabel Ekonomi

Assumsi atau analisa bahwa faktor ekonomi sering dijadikan alasan atas munculnya konflik di suatu daerah. Tidak sedikit pengamat sosial memandang bahwa kasus kerusuhan di beberapa wilayah

Indonesia, ambil saja contoh di Kalimantan dan beberapa daerah lainnya, disebabkan oleh kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal (asli) dengan kelompok pendatang (yang tak jarang berasal dari golongan masyarakat dengan etnis dan agama berbeda). Mungkin hal ini masih diperdebatkan, namun indikator ekonomi ini menjadi hal penting guna menggambarkan konflik sosial di sebuah wilayah tertentu.

B. Variabel Ideologi

Variabel ideologi dalam hal ini yang dimaksud adalah aliran politik atau sistem sosial apa dan bagaimana yang dianut, dipercaya dan diperjuangkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Di suatu daerah tertentu terkadang terdapat berbagai macam bentuk aliran politik (ideologi) yang dianut oleh masyarakat. Keragaman politik ini kemudian satu sama lain dapat berbenturan, terlebih jika dominasi ideologi tertentu dianggap mengganggu eksistensi ideologi lainnya. Pertentangan ideologi yang tajam diantara masyarakat pada akhirnya dapat memicu konflik.

C. Agama dan Kultur

Variabel agama banyak diyakini di sebagian wilayah masyarakat Indonesia yang heterogen ini, isu kemajemukan agama merupakan sebuah entitas (*entity*) kehidupan masyarakat berbangsa yang sangat mudah terpicu provokasi untuk dipertentangkan dan saling dibenturkan. Isu agama dan kultur menempati posisi penting dalam banyak peristiwa sosial. Dalam dinamika masyarakat variabel kultur dan agama merupakan sebuah identitas yang eksistensinya merupakan tanggungjawab setiap individu maupun seluruh golongan. Sayangnya hal ini kemudian dipahami secara sepotong-sepotong dalam bentuk arogansi identitas (*identity arrogance*).

D. Diskriminasi

Perbincangan menyangkut diskriminasi, telah lama berlangsung dalam dekade ini bahkan jauh sebelum pecahnya tragedi konflik di beberapa daerah. Tak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia, persoalan diskriminasi merupakan problem universal. Oleh karena itu di banyak negara telah memberlakukan berbagai ketentuan legal menyangkut persoalan ini. Dalam beragam konstitusi tersebut, definisi diskriminasipun sangat beragam. Kasus beberapa daerah di Indoensia, mungkin faktor diskriminasi dapat dilacak dari bentuk pelayanan pemerintah. Sangat mungkin pelayanan oleh pemerintah yang berbeda terhadap kelompok, golongan atau etnis tertentu dengan kelompok, golongan atau etnis yang lain dmenimbulkan kecemburuan masyarakat. Pelayanan pemerintah yang diskriminatif ini berujung

pada terbentuknya sekat dalam ruang sosial dan ekonomi masyarakat. Koentjaraningrat (1993) sebelumnya juga telah menuliskan konflik antar suku bangsa biasanya bermula karena 1) adanya perbedaan sumber penghasilan / mata pencaharian, 2) adanya pemaksaan unsur budaya dari suku bangsa lain, 3) adanya fanatisme, 4) adanya salah satu suku yang mendominasi, 5) adanya permusuhan secara adat. Namun sebaliknya ada pula beberapa unsur yang dapat dipakai untuk mewujudkan persatuan nasional antara lain:

1. Suku bangsa yang berbeda dapat saling bekerjasama secara ekonomi, sosial dan politik
2. Perwujudan keadilan sosial dan prinsip solidaritas.

Nampaknya apa yang dituliskan Kontjaraningrat (1993) tentang perwujudan nasional dalam beberapa tahun pasca reformasi di Indoensia mengalami kendala. Bangsa Indonesia yang majemuk kaya warna dan corak, sebelum krisis multidimensi ini dapat hidup saling berdampingan dan saling mengharagai perbedaan, dapat hidup dalam ruang sosial yang sama meski berbeda agama dan budaya. Namun kini tak dapat disangkal, masyarakat di wilayah konflik, telah tersegregasi (terpisah-pisah) dalam ruang-ruang sosial yang homogen (tidak ada pembauran). Akibatnya hal ini menimbulkan tidak harmonisnya (deharmonisasi) sosial masyarakat. Inipun juga menyimpan energi konflik jika tak segera dipahami.

Sebagai contoh di wilayah Maluku, suku-suku di Kepulauan Maluku sangat beragam. Selain masyarakat Asli kepulauan Maluku sendiri juga bermukim banyak suku pendatang, diantaranya Buton, Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, Bali, Manado dan sebagainya. Namun pasca konflik itu, nampaknya harmonisasi masyarakat belum terjalin kembali dengan baik seperti sebelum konflik.

Hal ini nampak misalnya pada pola pemukiman di wilayah pasca konflik Maluku, khususnya Ambon. Pola pemukiman penduduk menampakkan susunan penduduk yang menghuni sangat homogen. Penduduk dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda, sangat jarang tinggal berbaur dalam satu kompleks pemukiman (perumahan). Bahkan di Pulau Banda saat ini, hanya dihuni oleh kaum muslim dan sebagian kecil etnis Tionghoa, sedangkan, umat Nasrani, hingga saat ini belum kembali.

Akibat konflik masyarakat Ambon saling memisahkan diri dan mengelompok masing-masing berdasarkan etnis dan agama. Dalam skala yang lebih luas, saat ini wilayah Maluku terbagi menjadi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Komposisi sosial masyarakatnya

juga berbeda, Maluku, khususnya kota Ambon nampaknya dianggap mewakili daerah yang didominasi umat Kristen, sementara Maluku Utara didominasi umat Muslim. Segregasi masyarakat dalam ruang sosial ini sendiri, sesungguhnya adalah ekses dari konflik itu, dan sebagai ekses hal ini sekaligus juga dapat dapat memicu kembali bara konflik, jika tak ada mediasi yang terpelihara ditengah rekondisi Maluku saat ini.

Hasil penelitian Soumokil dan kawan-kawan (2005), lebih spesifik juga mengungkapkan potensi konflik di Maluku, khususnya di Kepulauan Aru sebagai sampel wilayah penelitiannya. Dalam laporan penelitiannya, digambarkan bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat Kepulauan Aru. Hubungan sosial berlangsung baik dan sangat harmonis antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis yang lain. Keharmonisan tersebut terlihat tanpa mempersoalkan perbedaan dan latar sosial budaya diantara mereka. Namun di satu sisi masih dijumpai perbedaan pandangan yang cukup mencolok yang bisa menjadi potensi konflik apabila tidak disikapi dengan baik (selengkapnya baca Soumokil, 2005:10, 22-35).

Bagaimanapun, saat ini Maluku dalam proses menata kembali (rekondisi) menuju Maluku yang lebih kondusif. Selain pembangunan kembali berbagai sarana publik, yang terpenting harus dibangun pula harmonisasi sosial masyarakat yang sempat tercabik.

Menyikapi soal itu, makalah ini mencoba menawarkan energi baru. Melalui pemahaman terhadap sumberdaya arkeologi, kita menggali akar budaya untuk upaya pemulihan sosial pasca konflik.

Kerangka Pikir : Memahami Arkeologi, Menggali Akar Budaya

Arkeologi adalah ilmu budaya benda, artinya arkeologi menganalisa kebudayaan manusia melalui benda atau material sebagai hasil kebudayaan yang ditinggalkannya.

Dalam pandangan arkeologi, budaya bendawi adalah refleksi manusia pelaku kebudayaan. Daud Aris Tanudirdjo (1996) menjelaskan tindakan manusia terbentuk secara bendawi atau refleksif, artinya selalu ada timbal balik yang aktif antara gagasan dan tindakan manusia dengan budaya bendawi. Masyarakat tidak hanya menjalankan budayanya secara pasif, tetapi aktif memberi ‘makna’ baru terhadap budayanya. Hodder (1991) seperti yang dikutip Tanudirdjo (1996) menuliskan budaya bendawi sebagai bagian dari budaya menjadi ‘sarana’ untuk menciptakan makna dan tatanan dalam masyarakat. (Hoder, 1991 dalam Tanudirdjo, 1996:66).

Dari penjelasan itu para arkeolog dituntut bisa memberikan pemaknaan terhadap budaya bendawi agar dapat dimanfaatkan sebagai media pemahaman terhadap masyarakat tentang wujud kebudayaan itu sendiri.

Tanudirdjo (1996) menulis salah satu isu yang penting dalam arkeologi Indoensia yang dapat direnungkan adalah masalah sumbangsih arkeologi bagi jati diri bangsa. Tak dapat disangkal lagi bahwa salah satu manfaat peninggalan masa lampau atau warisan budaya adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa dan sebagai pemersatu kelompok atau bangsa (Macleod, 1977, Cleere, 1998, Schifer and House, 1977, Grady, 1977 dalam Tanudirdjo, 1996: 70). Namun begitu informasi tentang jati diri tidak tersedia begitu saja. Mereka harus menggali dan menemukan pengetahuan itu. Disinilah arkeologi menduduki tempat yang amat penting. Arkeologi dianggap satu-satunya ilmu dapat menerobos masuk ke dalam dunia masa lampau. Arkeologi dipercaya untuk memproduksi informasi masa lampau (ibid). .

Dalam posisi ini, arkeologi diharapkan bisa menemukan pengetahuan tentang masa lampau dan menyajikannya kepada masyarakat luas. Pandangan itu seakan memberikan ketegasan, informasi yang disajikan oleh arkeologi sepertinya mampu membangun cara pandang publik soal kesejahteraan bangsa yang lahir dari keutuhan akar budaya masyarakat masa lampau yang terus berlangsung meski senantiasa menapaki perjalanan waktu dan gerak sosial yang dinamis.

Namun disadari, upaya membangun paradigma itu senantiasa mengalami kendala. Edy Sedyawati (1992) mengungkapkan kendala itu yakni *pertama*; ‘pengetahuan’ tentang masa lampau akan sangat bergantung pada teori yang digunakan, ideologi yang dianut serta keterlibatan peneliti terhadap obyek studinya. *Kedua*; konsep bangsa indonesia sebagai bangsa sebenarnya muncul awal abad 20, padahal sebelumnya indoensia adalah mozaik bangsa dan budaya, sehingga kesulitan akan muncul jika konsep bangsa Indoensia ditarik ke masa lampau.

Tanudirdjo (1996) menambahkan kesulitan lain, yakni sifat pengetahuan dan kepekaan sosial masyarakat. Dalam kenyataannya, arkeologi selalu dituntut menyajikan soal jati diri bangsa yang positif.

Soal jati diri bangsa Poespowardojo (1992) menuliskan arkeolog harus menyajikan kembali warisan budaya agar menjadi penting dan bermakna baik dalam dirinya. Menurut Tanudirdjo, akibat hal itu arkeologi menjadi bias, kepekaan sosial masyarakat juga menjadi kendala, hal ini karena Indonesia memang terdiri dari beragam suku

dan budaya, sehingga seringkali peka terhadap SARA. Oleh karena itu arkeologi harus hati-hati dalam menyampaikan pengetahuan, yang diperolehnya.

Shenan (1989) menuliskan pengetahuan tentang jati diri bangsa dapat menjadi legitimasi bagi kesatuan dan persatuan bangsa, tetapi dapat pula justru dipakai untuk menunjukkan bahwa masing-masing suku bangsa dalam kesatuan baru itu mempunyai sejarah budaya dan jati diri yang berbeda (Shenan, 1989 dalam Tanudirdjo, 1996 :70).

Bagi saya, arkeologi adalah proses memaknai dinamika budaya dalam konteks ruang dan waktu. Perlu diingat, tujuan arkeologi selain sebagai ilmu yang menitikberatkan pada tujuan dan manfaat ilmiah, juga diarahkan pada manfaat sosial untuk kepentingan masyarakat. Tanpa meninggalkan sisi ilmiah itu, yang terpenting, arkeologi harus mampu memediasi untuk kepentingan bangsa seutuhnya.

Berangkatdari pandangan itulah, saya tertarik untuk menggeledah lebih jauh, membedah lebih dalam peran sumberdaya arkeologi yang diharapkan mampu menjadi mediator di tengah pemulihan (*recovery*) dan penataan sosial pasca konflik di Maluku.

Apa yang saya tuliskan di atas merupakan sebuah refleksi, saat kini Maluku tengah dalam proses pemulihan, masih menyimpan energi konflik. Disadari telah banyak berbagai program recovery pasca konflik. Namun saya berpikir, arkeologi sebagai sebuah ilmu kebudayaan yang mempelajari budaya masa lampau, dapat memberi sumbangsihnya, memberikan energinya untuk turut berperan aktif dalam upaya pemulihan konflik, sekecil apapun bentuknya.

Mediasi Arkeologi: Memaknai Budaya, Meniti Jalan Harmonisasi

Sebuah pertanyaan kembali saya paparkan dalam bagian tulisan ini. Sejauh mana arkeologi mampu menjadi salah satu mediator pemulihan sosial pasca konflik di Maluku? Sejauh mana energi Arkeologi mampu diwujudkan sebagai pendorong pemulihan sosial di wilayah pasca konflik?

Arkeologi sebagai ilmu, mewujudkan energinya dengan memaparkan bukti-bukti tinggalan arkeologi (material budaya) yang diharapkan mampu memberikan pemahaman publik tentang keutuhan budaya bangsa. Melalui bukti-bukti peninggalan budaya masa lalu, arkeologi berupaya memberi arah dan membangun cara pandang publik dalam memahami dinamika sosial dan budaya. Dalam falsafah arkeologi, bagaimanapun dinamisnya perkembangan budaya masyarakat, hal itu masih dapat dilacak akar budayanya. Perbedaan budaya masyarakat

yang nampak saat ini, hanyalah bagian dari dinamisasi itu sendiri, seiring waktu, seiring bertambahnya populasi manusia di dunia. Sejatinya perbedaan budaya, bukanlah faktor yang menyebabkan pertentangan antara masyarakat pelaku budaya itu. Perbedaan budaya adalah dinamika dalam proses perjalanan budaya masyarakat.

Tinggalan arkeologi di beberapa wilayah justru menunjukkan adanya kerekatan sosial masyarakat. Gambarannya, produk budaya masa lampau tak mungkin dikerjakan tanpa melalui organisasi sosial masyarakat yang terpadu. Tak hanya itu dalam beberapa wilayah yang berbeda, banyak ditemukan karakter budaya yang serupa. Ini berarti diantara keduanya, dapat ditarik sebuah benang merah akar budayanya. Juga, ada keberagaman budaya dalam ruang sosial yang sama.

Hal ini semestinya dipahami bahwa akar budaya yang ditunjukkan melalui tinggalan arkeologi merupakan gambaran harmonisnya masyarakat dan bisa hidup berdampingan. Jika kembali meletakkan akar budaya sebagai prinsip dalam membangun hubungan sosial, maka konflik bisa dihindari.

Dalam banyak tulisan telah menjelaskan soal pentingnya arkeologi bagi jati diri bangsa dan persatuan bangsa. Menyoal kasus Maluku, beberapa peneliti arkeologi di wilayah ini, juga telah menuliskan hal yang sama sebut saja Sudarmika dan Suantika (2000).

Suantika (2000) menuliskan, dari bukti-bukti tinggalan arkeologi yang sampai kepada kita diketahui bahwa nenek moyang, masyarakat memiliki rasa hormat kepada leluhur, mementingkan rasa persatuan dan kesatuan serta memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Keadaan inilah yang pada dasarnya dirasakan secara bersama oleh seluruh masyarakat yang mendiami kepulaun nusantara yang akhirnya melahirkan suatu negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai. Jika belakangan ini terdapat ancaman desentigrasi, sepatutnya melihat ke belakang sejarah panjang kebudayaan Indonesia. Sejarah membuktikan masyarakat yang mendiami kepualuan di Nusantara ini memiliki konsep kebudayaan yang hampir sama (Suantika 2000:402).

Di Maluku, Sudarmika (2001) melaporkan, dari hasil penelitiannya, beberapa temuan arkeologi di beberapa situs menggambarkan sikap kerukunan dan organisasi masyarakat yang bekerja secara bersama-sama, misalnya untuk penggerakan dolmen dan beberapa benda megalithik lainnya yang diperkirakan dikerjakan secara bergotong royong terutama dalam pengangkutan bahan baku, karena tidak ada indikasi bahan baku dari lingkungan setempat. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Di daerah Maluku, Dolmen selain sebagai media pemujaan juga media dan simbol organisasi adat atau persekutuan antar individu dan kelompok masyarakat (Sudarmika, 2001:288-289). Dalam laporan tersebut dijelaskan oleh Sudarmika, bahan baku dolmen berasal dari wilayah yang jauh dari lokasi ditemukannya situs. Oleh karena itu proses pengrajaannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, terutama dalam hal pengangkutan bahan baku batu ke lokasi situs. Lepas dari analisa transformasi alam, keberadaan dolmen diyakini masyarakat sebagai wujud kerukunan masyarakat masa lampau.

2. Temuan mangkuk perunggu dengan ukiran dua naga yang ekornya berbelitan di situs Iha dan diperkirakan berangka tahun 1692. Simbol dua naga yang saling menyatu itu, menurut Suantika dan Sudarmika bermakna menyatunya dua kelompok masyarakat *Siwa* dan *Lima* (lihat selengkapnya, Suantika dan Sudarmika, 2005: 17).

Menurut Saleh Putuhena (2003) dalam buku *Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae* menuliskan budaya *Siwa Lima* merupakan persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda iman. Berdasarkan *Siwa Lima*, perbedaan tersebut merupakan kesepakatan budaya, artinya daerah Uli Siwa menerima Kristen (Abad XVI), sementara daerah Uli Lima memeluk Islam (XV). Dengan kata lain penerimaan agama (Islam dan Kristen) pada masa itu adalah kesepakatan budaya untuk melestarikan negeri Maluku (Putuhena dalam Ridwan Al Makassary, 2004:111). Dalam tulisannya, Putuhena mengungkapkan, konflik Maluku sebetulnya produk dari politik Kolonial.

Sejarawan Maluku, Pattikayhatu (2000) juga menuliskan tentang adat tradisi *Pela Gandong*. Pela gandong merupakan warisan budaya Maluku Tengah, khususnya Seram, Ambon dan Kepulauan Lease. Pela Gandong pada umumnya dipahami sebagai hubungan persaudaraan antara dua negeri atau lebih, baik negeri yang beragama Islam ataupun yang beragama Kristen (baca Pattykayhatu, 2000:1).

Pada masa VOC, sekitar tahun 1637 bentuk pela diwujudkan dalam kerjasama antara antara masyarakat yang bergama Islam dan Kristen bahu membahu melawan penjajah Belanda. Pela juga diwujudkan melalui kerjasamanya lainnya, misalnya pembangunan rumah ibadah gereja dan sekolah di Ambon dan Lease. Kebutuhan kayunya dibantu oleh masyarakat Seram, karena di wilayah itu banyak terdapat bahan baku kayu. Kerjasama itu melahirkan hubungan *persaudaraan* antara negeri-negeri Ambon, Lease dengan negeri Seram. Dapat dicatat juga hubungan pela antara masyarakat Kailolo yang bependuduk Islam

di Pulau Haruku dan Tihulae yang bependuduk Kristen. (*ibid*:3-5)

3. Makam Situs Letfuan, makam ini diduga sebagai cikal bakal nenek moyang masyarakat Kei di Maluku Tenggara (Suryanto dan Sudarmika, 1999: 14). Menurut penjaga kuburan seperti yang dituliskan dalam laporan Suryanto dan Sudamika (1999) itu kuburan tokoh tersebut bernama Dharmapala Harupalaka dan Ken Dedes yang berasal dari Bali. Masyarakat Letvuan bergama Kristen tetapi adat dan budaya masa lalu tak ditinggalkan, terutama pemujaan arwah leluhur. Patung yang merupakan wujud leluhur masih disimpan dan dihormati, meskipun patung tersebut hanya duplikat sebab aslinya dihancurkan oleh Belanda.
 4. Situs Banda Neira. Di situs ini terdapat tinggalan budaya yang kompleks, mulai dari Benteng, Gereja, mesjid, bahkan Klenteng Tionghoa. Wujud budaya materi ini mencerminkan beragamnya budaya masa lalu. Dengan kata lain, Situs Banda Neira sebagai wujud ruang pemukiman skala makro, terdapat heterogenitas (keberagaman) sosial dan budaya serta religi dan ideologi yang dapat hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Hal ini meggambarkan, sebelum konflik, masyarakat dengan budaya yang mejemuk, bisa hidup berdampingan.
 5. Bukti arkeologis lainnya misalnya budaya lukisan tangan di dinding-dinding gua, misalnya yang di temukan di Goa Lotvh. Lukisan ini memiliki karakter yang sama dengan budaya lukisan tangan yang ditemukan di gua-gua di Sulawesi Selatan, demikian juga di Sulawesi Tenggara. Apa artinya? Hal ini menunjukkan kebudayaan nenek moyang masyarakat Kepulauan Maluku memiliki karakter budaya yang sama dengan nenek moyang masyarakat Sulsel dan Sulawesi Tenggara. Pemahaman yang diharapkan muncul, sebelum berkembangnya peradaban dan budaya baru yang datang karena pengaruh Islam dan Kolonial (baca: Kristen), kebudayaan asli masyarakat Maluku sama wujudnya dengan kebudayaan nenek moyang masyarakat Sulsel dan Sultra. Akar kebudayaan yang sama (general) ini modal membangun harmonisasi sosial masyarakat yang berdiam di wilayah Maluku baik masyarakat asli maupun pendatang.
- Diman (1998) menuliskan, jenis tinggalan arkeologi di Maluku (khususnya prasejarah) berhubungan erat dengan budaya regional, hal tersebut karena diyakini bahwa jalur migrasi manusia melalui Philipina, Sulawesi, Maluku, Irian dan Melanesia dan telah berlangsung sejak 50 ribu tahun yang lalu. Dengan kaitannya dengan migrasi ini, Sulawesi

Utara termasuk dalam koridor yang dipakai dalam migrasi tersebut oleh karena itu jenis tinggalan arkeologi di Sulawesi, Maluku dan Irian mempunyai kesamaan.

Dari penjelasan Diman tersebut dapat ditegaskan, Sulawesi, Maluku dan Irian memiliki akar budaya yang sama, tak heran jika terdapat kesamaan (generalisasi) wajah budaya. Ini artinya hubungan antar suku bangsa telah terjalin sejak masa lampau di wilayah Maluku. Data ini diharapkan dapat dipahami sebagai bukti bahwa harmoniasi masyarakat telah terjalin dan terbangun karenanya. Masyarakat modern yang berdiam di Maluku saat ini, diharapkan berkiblat dalam proses panjang kebudayaan masa lampau yang mengantarkan pada kondisi yang sekarang ini. Konflik tak semestinya terjadi jika, akar budaya yang tertanam di antara suku bangsa yang berbeda di wilayah Maluku kembali direkatkan.

Sumberdaya arkeologi menjadi bukti kerekatan sosial masyarakat Maluku tempo dulu. Sumber daya arkeologi juga mampu memberikan pemahaman kepada kita soal berbagai fenomena dan proses budaya yang berlangsung. Ketika kita ‘membaca’ benda budaya, maka kita bisa memperoleh makna di balik perwujudan budaya dalam ruang dan tatanan sosial masyarakat. Tentu saja wacana ataupun konsep belaka takkan mampu berurat dan berakar di masyarakat jika tak ada upaya nyata untuk ini. Arkeologi sebagai ilmu melalui telaah materi budaya mungkin hanya mampu menyodorkan konsep dan wacana. Konsep dan wacana ini diharapkan menjadi energi pendorong untuk langkah nyata selanjutnya.

Tak dapat ditolak peran nyata dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Di sisi lain di tingkat Pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki instrumen dan kekuatan hukum yang bisa bekerja optimal dalam penanganan konflik. Konflik yang melibatkan massa merupakan proses *disassosiatif* yang sangat tajam (Purwanto, 1997 :21).

Konflik merupakan bentuk sikap reaksioner massa atas kontradiksi sosial baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itulah mengapa konflik sulit diselesaikan melalui pendekatan hukum. Konflik menyebabkan lumpuhnya relasi sosial masyarakat, sehingga pendekatan yang paling memungkinkan untuk penyelesaian menurut saya adalah melalui pendekatan sosial dan budaya.

Pendekatan sosial budaya ini sebenarnya telah tergali melalui berbagai kearifan sejarah budaya dan nilai tradisional, sebut saja *Pela Gandong* dan *Siwa Lima*. Namun ketika nilai tradisional itu mulai

memudar akibat konflik, maka perlu energi baru mendorong kembali kohesi sosial masyarakat. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi energi untuk menguatkan kembali akar tradisi yang pernah tertanam. Disinilah peran arkeologi sebagai sebuah proses memaknai budaya mulai merangkai kembali sebuah jalan ke arah itu.

Disini pula, arkeologi dapat menjadi energi baru dalam membangun kembali kerekatan sosial masyarakat Maluku. Ingat, harmoniasi masyarakat antar pemeluk agama sebelum tragedi konflik didasari oleh penghormatan dan penghargaan atas kearifan adat dan budaya.

Konflik di beberapa daerah termasuk di Maluku yang terjadi, lebih disebabkan oleh kondisi makro transisi politik di Indoensia, dari orde baru ke reformasi, dari sentralistik ke desentralisasi, dari otoriterianisme ke demokrasi. Hal ini menyebabkan mobilitas sosial masyarakat yang sangat tajam. Makalah ini tidak dalam posisi membahas fenomena politik tersebut.

Sistem Pendidikan Arkeologi Sejak Dini (SPASD)

Di pembahasan sebelumnya, saya telah menyinggung soal bagaimana mewujudkan arkeologi agar mampu mendorong berbagai upaya pemulihan sosial di wilayah pasca konflik seperti Maluku. Di awal pula telah saya sebutkan, bahwa arkeologi dalam posisi mediasi ini hanya menawarkan sebuah wacana untuk membangun cara pandang publik yang positif dalam menyikapi rumitnya dinamika budaya.

Sebuah wacana, tinggalah wacana belaka, jika tak didukung regulasi (sistem aturan) untuk penerapannya. Tentu saja, sebuah regulasi membutuhkan seperangkat instrumen dan institusi pelaksana. Dalam tulisan ini saya menawarkan sebuah instrumen yang saya sebut sebagai *Early Archaeological Education System* (EAES) atau Sistem Pendidikan Arkeologi Sejak Dini (SPASD). Menurut saya, EAES / SPASD, adalah penerapan yang mendasar dan sistematis dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya sumberdaya budaya sebagai media merekatkan kembali hubungan sosial di wilayah pasca konflik. EAES atau SPASD mutlak dibutuhkan di wilayah pasca konflik seperti Maluku. Tidak saja berlaku hanya di Maluku, tetapi di seluruh wilayah pasca konflik.

Rekomendasi penting untuk hal ini misalnya Pemerintah di semua level baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum pendidikan yang memberikan muatan terhadap kajian budaya baik budaya hidup maupun budaya mati (arkeologi). Pemda hendaknya

mengeluarkan kebijakan melalui perda mengusulkan rumusan muatan lokal dalam sistem kegiatan belajar mengajar ataupun pendidikan mulai SD hingga SLTA. Kurikulum berbasis muatan lokal ini mencantumkan mata pelajaran soal nilai tinggalan budaya materi (arkeologi) yang menunjukkan wujud keutuhan budaya bangsa Indonesia, khususnya wilayah Kepulauan Maluku. Tentu saja materi bahan ajar disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa / pelajar. Pendidikan arkeologi yang mungkin diterapkan di bangku SD hingga SMA misalnya kita sebut Pendidikan Arkeologi Indonesia (PAI).

Di benak saya, PAI bisa disepadankan dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita jadi fasih menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). Bisa pula disepadankan dengan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Pelajaran itu dimaksudkan untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Atau bisa pula disepadankan dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang kini berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN). Kita menjadi paham nilai-nilai Pancasila yang lahir dan tergali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan SPSAD melalui penerapan PAI, dimaksudkan kita menjadi paham tentang budaya lokal dan akar budayanya sebagai cermin budaya nasional secara utuh.

Posisi Balai Arkeologi (Ambon): Leader Institution

Balai Arkeologi (Ambon), sebuah lembaga pemerintah yang membidangi penelitian dan pengembangan arkeologi nasional diharapkan menjadi institusi terdepan. Terdepan karena, instansi inilah yang mempunyai tugas untuk menggali terus menerus berbagai kajian akar budaya melalui tinggalan materi budayanya.

Kajian yang matang hasil penelitian arkologi inilah kemudian menjadi konsep untuk materi pendidikan dan penyadaran serta pemahaman publik dalam menyikapi berbagai fenomena sosial budaya. Untuk kepentingan itu, penelitian arkeologi di wilayah Maluku semestinya lebih intensif lagi dilakukan dan dikembangkan, kemudian dipublikasikan.

Selanjutnya, sebagai *progress action*, dalam sosialisasinya keterlibatan berbagai lembaga terkait mutlak diperlukan. Selain lembaga-lembaga kajian sejatip, juga menggandeng lembaga-lembaga pendidikan, seperti kampus dan sekolah. Tak kalah penting juga menjalin sinergitas dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di daerah ini. Tentu saja peran yang dilakukan setiap pihak berdasarkan porsinya masing-masing.

Posisi Pemda tentu mendapat tempat, melalui Dinas Parisiwisata baik tingkat Kabupaten maupun provinsi sebagai salah satu fasilitator.

Langkah strategis yang penting dilakukan yakni, Balar (Ambon) merancang berbagai program sosialisasi di masyarakat, juga kalangan sekolah. Sasaran utama di arahkan ke siswa-siswi, kalangan masyarakat urban dan masyarakat desa. Semua prakarsa bisa terlaksana jika kebijakan pemerintah juga memberi dukungan. Pemerintah dimaksud meliputi semua level dari pusat hingga pemerintah desa. Balar Ambon juga merumuskan materi muatan lokal dengan melibatkan kampus dan akademisi. Tindak lanjut dari berbagai program ini yakni usulan kepada pemerintah melalui dinas pendidikan untuk memasukkan materi muatan lokal kajian sumberdaya arkeologi sebagai khasanah menggali akar budaya yang utuh di Maluku. Langkah ini sebagai embrio untuk mewujudkan kurikulum berbasis lokal.

Dalam proses pengawalan agenda tersebut, Balar (Ambon) bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus dan sekolah, LSM dan Ormas, mengoptimalkan peran melalui berbagai kegiatan pendidikan informal dan penyadaran budaya kepada publik, lintas etnis, dan agama. Terakhir, semua ini dapat terwujud, jika pemerintah pusat dan daerah mendukung sepenuhnya bagi terealisasinya program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif, 1998. Menemukan Peradaban. Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indoensia. Logos. Wacana Ilmu. Jakarta
- Daud Aris Tanudirdjo, 1996. Arkeologi Pasca Modernisme Untuk Direnungkan. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, cipanas 2-16 maret, Jilid 2 Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Edisi keempat belas Jakarta. Jambatan
- Pattikayhatu, J.A, Drs, 2000. Pela Dan Gandong Dalam Perspektif Sejarah. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat jenderal dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Propinsi Maluku.

Poepowardoyo, 1992. Arkeologi dan Jatidiri Bangsa. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI di Batu Malang.

Poerwanto, 2000. Teori Konflik Dan Dinamika Hubungan Antar Suku Bangsa. Bulettin Humaniora. Bulettin Fak. Sastra No. VII. Universitas Gajah Mada

Sedyawaty, Edy, 1992. Arkeologi dan Jatidiri Bangsa. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI di Batu Malang.

Sudarmika G.M, 2000. Sumberdaya Arkeologi Peranannya Masa Kini Dan Masa Depan. Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu Dalam Menatap Masa Depan. Proceeding EHPA Bedugul 14-17 Juli. Proyek Peningkatan Penelitian Arekeologi Jakarta

Suantika Wayan I, 2000. Tinggalan Arekologi Sebagai Wahana Pemersatu Unsur Bangsa. *Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu Dalam Menatap Masa Depan. Proceeding EHPA Bedugul 14-17 Juli.* Proyek Peningkatan Penelitian Arekeologi Jakarta.

Suantika W.I.,Sudarmika GM, 2001. Laporan Peneltian Situs Iha, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Balai Arkeologi Ambon.

Suryanto, D., GM . Sudarmika, 2000. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Di Desa Vaan,Letvuan, dan Ohoidertawun Kecamatan Kei kecil, Maluku Tenggara, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Pusat penltian Arkeologi, Balai Arkeologi Ambon.

RUU- ADRE, 1999. Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangsa dengan Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) Sulawesi Selatan, Makassar.

Vermonte J.P., Budiman H., 2004. Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004, Kasus Empat Daerah Pasca Konflik di Indonesia